

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- _____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- _____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157.

Buku

- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budhiartha, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Friedman, Lawrence M., 2021, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspektif)*, Nusamedia, Bandung.
- HR, Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penulisan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Munaaf, Yusri, 2016 *Hukum Administrasi Negara*, Riau, Marpoyan Tujuh Publishing, Riau.
- Purnomo, Joko, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta.
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Agustina, Enny, 2018, *Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Hukum Media, Vol. 2 No. 1.
- Ansori, Lutfil, 2017, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Pro gresif*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2.
- Anwar, Khaeril, 2015, *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jurnal IUS, Vol. 3 No. 8, 209.

- Handayani, Yusrin, 2021, *Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan*, Syntax literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6 No. 1.
- Humairah, Venny, 2016, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 2.
- Kadarsih, Setiajeng Kadarsih, 2010, *Tugas dan Wewenang mbudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 3 Tahun 2008*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 2.
- Mahfud, M. Maftuhan dan Fery Anka Sudandar, 2019, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pendampingan, Penyusunan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2.
- Malik, Sofian, 2020, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5 No. 2, 327.
- Moho, Hasaziduhu, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi :59.
- Nasution, Ali Imran Nasution, 2020, *Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 2.
- Ngarsiningtyas, Situ Khoiriyah dan Walid Mustafa Sembiring, 2016, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 4 No. 2.
- Pahlawan, Regy Hilman, 2019, *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat*, Jurnal Civic Hukum, Vol. 4 No. 2.
- Prasetya, Ahadi Fajrin, 2016, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur*, Fiat Justitia, Vol. 10 No. 3.
- Puasa, Rafly Rilandi, dkk., 2018, *Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Sitaro*, Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1.
- Purnamasari, Galuh Candra, 2019, *Pergeseran Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang*, Refleksi Hukum, Vol. 3 No. 2.
- Rosidin, Utang, 2019, *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No. 1.
- Setiadi, Wicipto, 2009, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 6 No.4.
- Setyaningrum, Christine Ayu dan Fifiana Wisnaeni, 2019, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 2.

Sumber Lainnya

Rostania Nur Asiyah, 2022

KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWRATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI PADA PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA (Studi di Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Wawancara dengan Rasim, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sikayu, 17 Oktober 2021.

Wawancara dengan Aris Setiawan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sikayu, 25 Mei 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemendikbud.go.id>.

Desa Sikayu, <https://sikayu.kec buayan.kebumenkab.go.id>.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Nomor 1/BPD/Kep/2019 tentang Penetapan Susunan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen